

Analisis Sistem Penggunaan Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Dalam Penganggaran Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

Wildan Said¹, Reni Yendrawati²
Prodi Akuntansi, Universitas Islam Indonesia

Jl. Prawiro Kuat, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Email: 19312164@students.uii.ac.id¹, 903120103@uui.ac.id²

Abstract *The Institution Level Financial Application System (SAKTI) is an application part of the Integrated Financial Management Information System (IFMIS) which must be used by institutions/work units managing funds originating from the APBN. This system is designed to support financial management principles that are more orderly, effective, efficient, economical, transparent, accountable, integrated and performance-based. The aim of this research is to analyze the use of SAKTI in providing convenience in budgeting, obstacles when using SAKTI, and alternative technical methods if there are obstacles when using SAKTI. This type of research is descriptive qualitative with data collection methods by direct observation in the field and collecting additional data and information from credible sources. The results of the research that has been carried out indicate that SAKTI is proven to be able to provide easy access for institutions/work units, although there needs to be a solution to overcome existing obstacles.*

Keyword : *Accounting Information Systems, Public Sector Accounting, SAKTI, IFMIS*

Abstrak Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi bagian dari *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)* yang wajib digunakan oleh lembaga/satker pengelola dana yang berasal dari APBN. Sistem ini dirancang untuk mendukung prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang lebih tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, terpadu serta berbasis kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan SAKTI dalam memberikan kemudahan dalam penganggaran, kendala ketika menggunakan SAKTI, dan metode teknis alternatif apabila ada kendala saat menggunakan SAKTI. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data dengan cara observasi langsung ke lapangan dan mengumpulkan data dan informasi tambahan dari sumber-sumber yang kredibel. Hasil penelitian yang telah dilakukan, menyebutkan bahwa SAKTI terbukti dapat memberikan kemudahan akses bagi para lembaga/satker, walaupun perlu adanya solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik, SAKTI, IFMIS.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa sistem informasi berperan penting dalam upaya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) karena telah dikembangkan serta digunakan di beberapa sektor swasta. Pemerintah berusaha mengatur pelayanan publik serta kemajuan teknologi dalam bentuk penyelenggaraan layanan elektronik atau *e-Government* (Amriani & Iskandar, 2019). Menurut (Handayani et al., 2021) *E-government* sebagai penggunaan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan proses akses dan penyampaian informasi serta layanan pemerintah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan pegawai.

Anggaran merupakan representasi jelas dari hasil perumusan serta perencanaan strategis yang telah dikembangkan. Tahap penganggaran merupakan tahap sangat penting sebab anggaran yang tidak efektif serta tidak berorientasi pada kinerja akan menjadi

penghambat rencana yang telah disusun. Penganggaran pada sektor publik harus dipantau sejak dari perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan. Proses penganggaran dapat menjadi lebih efektif bila diawasi badan khusus yang bertugas dalam mengawasi proses perencanaan serta pengendalian anggaran.

Anggaran pada umumnya dapat menjadi alat dalam mengungkapkan visi, misi, nilai, karakteristik, serta tujuan organisasi. Sederhananya, anggaran adalah rencana kuantitatif suatu organisasi yang disiapkan dalam jangka waktu tertentu. Suatu organisasi menentukan rencana strategis, agenda, serta tujuannya secara lebih efektif dalam jangka pendek (biasanya satu tahun) dengan adanya penganggaran. Suatu negara, seperti organisasi lainnya, mempunyai anggaran yang menjadi alat dalam meraih tujuannya. Pengelolaan anggaran yang baik dapat menentukan arah politik dalam mencapai tujuan negara.

Konteks negara menjadi sebuah organisasi, sistem anggaran adalah suatu alat dalam mengalokasikan sumber daya yang dapat berupa suatu barang maupun jasa yang tersedia bagi masyarakat negara tersebut. Sistem anggaran negara atau disebut anggaran sektor publik dikembangkan dalam menyesuaikan dengan perkembangan sistem administrasi publik dan kebutuhan masyarakat dalam konteks sistem sosial serta politik tertentu (Oktaverina et al., 2019). Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan / DJPB Kemenkeu telah membangun sistem aplikasi terintegrasi yang diterapkan di keseluruhan satuan kerja (satker) lembaga pemerintah pusat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia yang dikenal dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi apakah penggunaan sistem pelaporan keuangan tingkat instansi atau SAKTI memudahkan pelaporan keuangan di BBPPKS Regional III Yogyakarta dan kendala-kendalanya, serta mengkaji apakah terdapat alternatif metode teknis jika terjadi hambatan yang terjadi selama penggunaan. Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah dan seluruh civitas akademika khususnya Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

E-Government

Bank Dunia mengartikan *e-Government* yaitu: “*e-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with*

citizens, businesses, and other arms of government” (mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi seperti *wide area network*, internet, serta *mobile computing*) oleh para instansi pemerintah yang mempunyai kemampuan dalam berhubungan dengan warga negara, pelaku bisnis, serta lembaga/instansi pemerintah lainnya (Muqoffa, et al., 2022). Berdasarkan definisi tersebut, aplikasi *e-Government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada instansi pemerintah atau organisasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan dalam tata kelola pemerintahan (*governance*) yang lebih efisien, efektif, produktif dan responsif dengan partisipasi pemerintah, pelaku ekonomi dan sosial.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terlibat dalam pencatatan, klarifikasi dan pelaporan peristiwa atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh beberapa pihak tertentu untuk mengambil keputusan yang dapat diterapkan pada organisasi tingkat tinggi negara dan lembaga afiliasinya (Sari, Mintarti, & Pattisahusiwa, 2018).

Perencanaan dan pengendalian pada hakikatnya adalah dua hal dalam satu ruangan yang sama sehingga keduanya harus diperhatikan secara bersamaan. Jones and Pendlebury (Mujiaty & Lavita, 2019) membagi proses perencanaan serta pengendalian manajerial pada suatu organisasi sektor publik dalam lima tahap sebagai berikut:

1. Perencanaan tujuan serta sasaran dasar
2. Perencanaan operasional
3. Penganggaran
4. Pengendalian serta pengukuran
5. Pelaporan, analisis serta umpan balik

Penganggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai perkiraan kinerja yang ingin dicapai selama jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk keuangan, sedangkan penganggaran suatu proses atau cara penyusunan anggaran. Anggaran publik mencakup rencana bisnis yang dinyatakan sebagai rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mujiaty & Lavita, 2019).

Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional berguna dalam merencanakan kebutuhan sehari-hari saat menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam kategori anggaran operasional ialah “Belanja Rutin” (*recurrent expenditure*) yaitu pengeluaran yang manfaatnya

hanya untuk satu tahun anggaran serta tidak bisa menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah.

2. Anggaran Modal

Anggaran modal adalah rencana jangka panjang serta pembelanjaan atas aktiva tetap seperti perabot, peralatan, kendaraan, gedung, dan lain sebagainya. Pengeluaran modal besar umumnya dilakukan dengan cara pinjaman.

Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut (Nanda & Darwanis, 2016) prinsip anggaran berbasis adalah sebagai berikut:

1. Transparansi serta Akuntabilitas Anggaran

Anggaran seharusnya menampilkan informasi jelas tentang tujuan, sasaran, hasil serta manfaat yang bisa didapat oleh masyarakat dari suatu program/kegiatan yang akan dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan adalah perkiraan yang terukur secara realistis serta bisa dicapai setiap sumber pendapatan, selanjutnya belanja yang dianggarkan setiap pos anggaran adalah batas tertinggi pengeluaran belanja.

3. Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil sehingga seluruh masyarakat bisa memperoleh manfaat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran

Penyusunan anggaran harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, kecepatan, efektifitas dan harus wajar. Modal yang diberikan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menciptakan peningkatan serta kesejahteraan optimal untuk kepentingan pemangku kepentingan.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan pencapaian hasil kerja dari rencana alokasi biaya yang sebelumnya ditentukan. Hasil pekerjaan yang diraih harus sama atau lebih besar dari biaya yang sebelumnya ditentukan.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

SAKTI merupakan sistem aplikasi yang memodernisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara di sisi pengguna anggaran, mulai dari tahap penyusunan hingga pertanggungjawaban. SAKTI hadir sebagai pengembangan dari Modul Pengelolaan Keuangan

Unit Kerja yang semula ada di SPAN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di sisi unit kerja (Kementerian Keuangan RI - DJP, 2018).

Berdasarkan Pasal 1 PMK Nomor 159/ PMK.05/2018 (Pasal 1 PMK Nomor 159/ PMK.05/2018) tentang Pelaksanaan Uji Coba Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Badan, “SAKTI adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada instansi pemerintah meliputi Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aktiva Tetap, Modul Piutang dan Modul Akuntansi dan Pelaporan”.

Menurut PMK Nomor 159/PMK.05/2018 (PMK Nomor 159/ PMK.05/2018), SAKTI hadir sebagai aplikasi rentang pencerminan di tingkat satuan kerja, dan Sakti diharapkan menjadi sistem informasi pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta bertanggung jawab. Inovasi Sakti dilatarbelakangi untuk menerapkan aturan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara modern dan juga merekomendasikan penerapan *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS). Aplikasi SAKTI juga mengintegrasikan seluruh aplikasi unit kerja yang ada yang fungsi utamanya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, 2021).

Model Penganggaran

Modul penganggaran merupakan modul yang mencakup proses penyusunan rencana kerja anggaran hingga penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, termasuk proses perencanaan alokasi anggaran serta pengumpulan pendapatan suatu periode pelaksanaan anggaran. (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, 2021).

Ruang Lingkup Modul Penganggaran:

1. Fungsi Penyusunan Anggaran (Kertas Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga/RKAKL) dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)); Belanja, Pendapatan/Penerimaan, Informasi Badan Layanan Umum (BLU), Informasi Valas/Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Terima Data Pegawai.
2. Fungsi Penyusunan Rencana Penarikan Belanja serta Penerimaan/Pendapatan:
 - Rencana Penarikan Belanja: Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) /Hal III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Perencanaan Kas (Renkas) harian.
 - Rencana Penarikan Penerimaan/Pendapatan.
3. Fungsi Penyusunan Revisi Anggaran; Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Revisi Renkas

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan keadaan saat ini. Selain itu, penelitian deskriptif juga bertujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri suatu fenomena alam atau fenomena akuntansi, tanpa tertarik pada hubungan sistematis fenomena tersebut dengan fenomena lainnya. Sumber data penelitian dan teknik pengumpulannya dibagi menjadi dua kategori: data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui kerja lapangan, diamati dan dicatat oleh peneliti, dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui kerja lapangan, yang diamati dan dicatat oleh peneliti. Penelitian juga mengambil literatur dari buku teks, majalah dan literatur ilmiah, sebagai referensi dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data ini adalah metode analisis deskriptif.

HASIL DAN DISKUSI

a) Kemudahan Penggunaan Aplikasi SAKTI dalam Penganggaran di BBPPKS

Aplikasi SAKTI telah dimanfaatkan semenjak 2015 pada beberapa satuan kerja dalam tujuh kementerian/lembaga, yaitu kementerian keuangan, kementerian sekretariat negara, Bappenas, BPK, KPK, PPATK, dan LKPP. Tahun 2020 dilakukan pengalihan aplikasi SAKTI yang sebelumnya berbasis desktop menjadi berbasis Web. Terdapat beberapa kelebihan SAKTI berbasis web ini, sebagai berikut:

1. *Open Platform*, yaitu kemudahan untuk diakses dengan berbagai macam *devices* serta multi OS. SAKTI dapat diakses dengan laptop, tablet serta ponsel.
2. Kemudahan distribusi, yaitu pengguna tidak memerlukan pembaharuan maupun pendownloadan aplikasi, karena aplikasi ini bisa diakses dengan browser yang tersedia di *device*.
3. Kemudahan akses, yaitu SAKTI diakses dengan memakai jaringan internet dan tidak bergantung dengan jaringan intranet (VPN).
4. Spesifikasi *devices* rendah, yaitu kecepatan proses SAKTI tidak bergantung pada spesifikasi *hardware end user*.
5. Tampilan yang lebih fleksibel, yaitu besar dan kecilnya tampilan dapat disesuaikan dengan layar *devices* yang digunakan saat mengakses SAKTI.
6. Fungsionalitas, yaitu *user interface* dan fungsionalitas sama dengan versi desktop, sehingga pengguna SAKTI sudah terbiasa melihatnya.

b) Kendala Penggunaan Aplikasi SAKTI dalam Penganggaran di BBPPKS

Hal-hal yang menjadi kendala dalam penggunaan aplikasi SAKTI dalam penganggaran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelatihan yang kurang optimal, karena kegiatan sosialisasi dan bimtek dilaksanakan secara daring, seperti *video conference* yang dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom.
2. Item penganggaran terlalu detail dan rinci sehingga sewaktu pelaksanaan pencairan mengalami kesulitan, yang mengakibatkan sering terjadinya revisi anggaran.
3. Karena sudah saling terkoneksi, jika modul komitmen, modul pembayaran dan modul bendahara salah input, maka di modul pelaporan akan terlihat.

c) Metode Teknis Alternatif Aplikasi SAKTI dalam Penganggaran di BBPPKS

Dalam praktik yang terjadi di modul penganggaran, diketahui belum ada metode teknis alternatif selain menggunakan aplikasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan aplikasi SAKTI berlaku untuk semua satker yang mendapatkan anggaran dari APBN, sehingga SAKTI terintegrasi ke seluruh aplikasi satker yang ada. Hal tersebut juga sebagai perwujudan e-governance dalam fungsi-fungsi treasury pemerintah, dimana proses atau tata kelola keuangan negara dilakukan berbasis elektronik.

d) Solusi

Adapun beberapa solusi yang dapat penulis berikan untuk mengatasi kendala yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi penggunaan aplikasi SAKTI dapat dilakukan secara offline, karena peserta lebih mudah untuk memahami materi-materi yang disampaikan. Selain itu dengan melakukan sosialisasi secara offline fokus peserta tidak terpecah, karena sebagian dari peserta tetap melakukan kegiatan rutin mereka saat pelatihan dan diklat.
2. Satker BBPPKS Yogyakarta bisa mengusulkan kepada KPPN agar sosialisasi bisa dilaksanakan secara offline.
3. Satker BBPPKS Yogyakarta dapat mengirimkan usulan penyederhanaan item pada modul penganggaran ke pusat, sehingga pada jadwal maintenance sistem, item-item di modul penganggaran dapat lebih mudah untuk di pahami.
4. Satker BBPPKS Yogyakarta dapat melakukan konsultasi ke KPPN apabila terjadi kendala dalam penggunaan aplikasi SAKTI.

KESIMPULAN DAN SARAN

a) Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, penerapan sistem aplikasi SAKTI di BBPPKS Yogyakarta sukses diterapkan serta diimplementasikan dengan baik. Penerapan aplikasi SAKTI tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 yang mengatur tentang pelaksanaan sistem SAKTI. Aplikasi SAKTI mampu menjadi wujud otomasi serta transformasi layanan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. Selanjutnya, sebagai perwujudan *e-governance* dalam fungsi-fungsi *treasury* oleh pemerintah. Adanya aplikasi SAKTI, satker BBPPKS Yogyakarta sangat terbantu serta memudahkan dalam pelaksanaan proses pengelolaan anggaran hingga dengan pelaporan pertanggungjawaban.

Penerapan penerapan SAKTI di BBPPKS Yogyakarta telah banyak memberikan dampak positif dan konstruktif terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan, tugas, fungsi utama sebagai pengguna dan agen Bendahara Umum Negara (BUN). Selain itu, tingkat pemahaman yang baik terhadap sumber daya manusia dan keamanan data pada aplikasi SAKTI dinilai sangat membantu dalam menjalankan segala transaksi dan aktivitas di aplikasi SAKTI. Memastikan fasilitas dan layanan pendukung seperti peralatan IT dan Internet cukup mumpuni dan memadai sehingga penerapan SAKTI di BBPPKS Yogyakarta dapat dilaksanakan dan dilaksanakan dengan baik.

b) Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi penulis dapat dinilai dapat memberikan kontribusi terhadap penerapan aplikasi SAKTI di BBPPKS Yogyakarta, antara lain pemanfaatan dan maksimalisasi inovasi teknologi dan informasi tentang aplikasi SAKTI dengan meningkatkan pemahaman personel terhadap seluruh aplikasi, hal ini bisa dilakukan dengan mempelajari petunjuk serta teknis, mengikuti sosialisasi serta bimtek SAKTI. Selain itu, diperlukan adanya kontrol serta evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala pada penerapan aplikasi SAKTI di BBPPKS Yogyakarta dalam rangka mewujudkan pengelolaan pelayanan perbendaharaan serta keuangan negara yang lebih tertib, efisien, ekonomis, akuntabel serta berbasis kinerja dan berkesinambungan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Amriani, T. N., & Iskandar, A. (2019). Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). *Kajian Ekonomi & Keuangan* 3 No. 1, 54-74.

- Bastian, I. (2021). Manajemen Keuangan Publik. Penerbit Andi, 2021. Yogyakarta.
- Handayani, F., Fauziah, S., Afandi, A., & Suwarno, C. A. (2021). SAKTI: Inovasi Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara. HUMANIS (Humaniora, Manajemen dan Sains). Vol. 2 No. 1 Hal. 201-214.
- Kementerian Keuangan RI. (2018, Juli 03). Cukup Satu Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Diterima dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/data-publikasi/berita-terbaru/2817-cukup-satu-aplikasi-sakti-sistem-aplikasi-keuangan-tingkat-instansi.html>
- Kementerian Keuangan RI. (2021, September 30). Modul Penganggaran. Diterima dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta1/id/data-publikasi/sakti/modul-modul-sakti/2811-modul-penganggaran.html>
- Mujiaty, Y., & Lavita. (2019). Modul Akutansi Sektor Publik. Universitas Bina Sarana Informatika. Yogyakarta.
- Muqoffa, ANF., Mawar, M., & Serikandi, N. (2022). Manfaat Media Sosial Dalam E-Goverment Di Indonesia Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora Vol. 1 No. 3 Hal. 36-40.
- Nanda, R., & Darwanis. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol.1 No.1. Hal. 327-340.
- Oktaverina, C., Fakhriansyah, M., Rachma, A., & Farida, I. (2019). Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan. Jurnal SIKAP. Vol. 04 No. 1 Hal. 109-122.
- Pambudi, Y. A., & Alhabsy, M. A. (2022). Implementasi Penggunaan Aplikasi SAKTI Pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 5.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 15, No 1.